

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Teori Investasi**

Investasi adalah sebuah bentuk pengeluaran modal yang bertujuan untuk pembelian suatu barang hasil produksi yang akan dijadikan aset untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dari pada modal awal. Investasi terlibat dalam berbagai bidang ekonomi, seperti manajemen bisnis dan keuangan baik untuk rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Secara umum investasi diartikan sebagai pengeluaran untuk membeli barang dan modal serta perlengkapan produksi guna menambah kemampuan produksi barang dan jasa dalam perekonomian. Pertambahan jumlah barang modal memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa yang akan datang.

Menurut Sadono Sukirno (2002), investasi adalah sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman suatu modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan juga perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang modal dan juga jasa yang tersedia dalam perekonomian di masa depan. Investasi yang lazim disebut dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal yang merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Menurut Boediono (2001) mendefinisikan investasi adalah pengeluaran oleh sektor produsen (swasta) untuk pembelian barang dan jasa untuk menambah stok yang digunakan atau untuk perluasan pabrik.

Menurut Henry Simamora (2000), investasi adalah suatu aktiva yang digunakan oleh perusahaan untuk menambahkan atau pertumbuhan kekayaannya melalui distribusi hasil investasi misalnya pendapatan bunga, royalti, deviden, serta pendapatan sewa lainnya. Sebagai apresiasi nilai investasi, atau untuk manfaat bagi suatu perusahaan yang berinvestasi, seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan dagang. Investasi menempati posisi yang penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Besar kecilnya investasi dalam suatu kegiatan ekonomi ditentukan oleh tingkat suku bunga, tingkat pendapatan, kemajuan teknologi, kondisi ekonomi serta faktor lainnya.

Menurut Salim HS dan Budi Sutrisno (2008) investasi ialah penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Pengertian Investasi dalam Ensiklopedia Indonesia, Investasi yaitu penanaman modal atau penanaman uang dalam proses produksi dengan membeli gedung-gedung, mesin-mesin, bahan-bahan cadangan, penyelenggaraan uang kas serta perkembangannya. Dalam hal ini cadangan modal barang diperbesar selama tidak ada modal barang yang harus diganti.

Hakikat investasi dalam definisi ini adalah penanaman modal yang dipergunakan untuk proses produksi. Dalam hal ini investasi yang ditanamkan hanya digunakan untuk proses produksi saja. kegiatan investasi dalam realitanya tidak hanya dipergunakan untuk proses produksi, tetapi juga pada kegiatan untuk membangun berbagai sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan investasi.

Investasi adalah variabel ekonomi yang menjadi penghubung antara kondisi pada saat sekarang ini dengan kondisi di masa yang akan datang, dan juga yang menghubungkan antara pasar barang dan pasar uang. Peranan suku bunga sangat penting dalam menjembatani ke dua pasar tersebut. Investasi juga merupakan komponen PDB yang paling *volatile*. Dalam konteks makroekonomi, pengertian investasi adalah “...*the flow of spending that adds to the physical stock of capital*”. Dengan demikian kegiatan seperti pembangunan rumah, pembelian mesin, pembangunan pabrik dan kantor, serta penambahan barang inventori suatu perusahaan termasuk dalam pengertian investasi tersebut, sedangkan kegiatan pembelian saham atau obligasi suatu perusahaan tidak termasuk dalam pengertian investasi ini (Dornbusch, 1996).

### **2.1.1 Jenis-Jenis Investasi**

Investasi dalam ekonomi makro menurut Norido Canda Sakti (2010) dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Investasi Otonom (*otonomous investment*)

Investasi yang tidak dipengaruhi oleh kenaikan pendapatan nasional dan tingkat bunga. Dengan kata lain investasi pada saat pendapatan atau bunga sama dengan nol. *Autonomos investment* dapat juga diartikan sebagai investasi yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh pendapatan, tetapi dapat berubah karena adanya perubahan faktor-faktor di luar pendapatan (teknologi, kebijakan pemerintah, dan harapan pengusaha).

## 2. Investasi Terpengaruh (*induced investment*)

investasi yang terpengaruh adalah investasi yang dipengaruhi oleh pendapatan nasional, artinya pendapatan nasional yang tinggi akan memperbesar pendapatan masyarakat dan selanjutnya pendapatan masyarakat yang tinggi tersebut akan memperbesar permintaan terhadap barang-barang dan jasa-jasa. Maka keuntungan perusahaan akan bertambah tinggi dan ini akan mendorong dilakukannya lebih banyak investasi.

Menurut Mankiw (2000), investasi terdiri dari barang yang dibeli untuk penggunaan masa depan. Investasi terbagi menjadi tiga, yaitu *business fixed investment*, *residential investment* dan *inventory investment*. *Business fixed Investment* mencakup sarana dan prasarana yang digunakan perusahaan dalam produksinya, sementara *Residential Investment* meliputi pembelian rumah baru, baik yang akan ditinggali oleh pemiliknya maupun yang akan disewakan, sedangkan *Inventory Investment* adalah barang yang disimpan oleh perusahaan di gedung, meliputi bahan baku, persediaan, barang setengah jadi dan barang jadi.

Menurut Abdul Halim (2005) investasi dibedakan menjadi dua, yaitu: investasi aset financial (*financial asset*) dan investasi pada aset-aset riil (*real assets*). Investasi sektor riil adalah jenis investasi dengan pengadaan aset-aset contohnya seperti tanah, bangunan, mesin dan sebagainya. Investasi *sector financial* adalah jenis investasi yang penanaman modalnya berupa instrumen-instrumen keuangan di pasar modal maupun pasar uang. Instrumen-instrumen itu seperti saham, obligasi dan valas.

Menurut Martono dan D.Agus Marjito (2002) menyatakan bahwa investasi dilihat dari jangka waktunya. Investasi terbagi menjadi 3 macam yaitu: investasi jangka pendek, investasi jangka menengah dan investasi jangka panjang. Sedangkan dilihat dari jenis aktivasnya, investasi dibedakan menjadi 2 jenis yaitu investasi pada aktiva riil dan investasi dalam aktiva non-riil. Investasi dalam aktiva riil misalnya investasi dalam tanah, gedung, mesin dan peralatan-peralatan. Investasi dalam aktiva non riil misalnya investasi kedalam surat-surat berharga.

### **2.1.2 Penanaman Modal**

Menurut UU No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman Modal terbagi menjadi dua bagian, yaitu: Penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri, Sedangkan Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri.

Menurut Harjono (2007) Penanaman modal dalam negeri adalah penggunaan modal oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha bagi

usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Menurut Sumantoro (1982) usaha pengembangan penanaman modal dalam negeri telah dirintis oleh pemerintah, yaitu dengan kebijakan kredit investasi. Pemberian kredit investasi memerlukan keahlian dalam proses pembangunannya. Pemberian atau penyaluran kredit investasi sering didasarkan pada perintah atau komando dari atasan. Hal ini menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan dimana terjadi pemborosan keuangan negara dan pengaruhnya terhadap inflasi.

Penanaman modal asing sangat penting untuk pengembangan ekonomi suatu wilayah. Ciri suatu negara yang kurang berkembang ialah “modal kurang” atau “tabungan rendah” dan “investasi rendah”. Tidak hanya persediaan modal yang sangat kecil tetapi laju pembentukan modal uang sangat rendah. Rata-rata investasi kotor hanya sekitar 5 sampai 6% dari pendapatan nasional kotor, sedangkan negara maju berkisar antara 15 sampai 20%. Laju tabungan yang rendah hampir tidak cukup untuk menghadapi pertumbuhan penduduk yang cepat dengan laju 2 sampai 2½% per tahun, apalagi menginvestasi di proyek-proyek modal baru. Dengan laju pertumbuhan yang ada, mereka hampir tidak dapat menutup penyusutan modal dan bahkan untuk mengganti peralatan modal yang ada. Usaha memobilisasi tabungan domestik melalui perpajakan dan pinjaman masyarakat hampir tidak cukup untuk menaikkan laju pembentukan modal yang ada melalui investasi. Malahan langkah tersebut mengakibatkan merosotnya standar konsumsi, dengan membuat rakyat semakin menderita. Impor modal asing membantu mengurangi kekurangan tabungan modal domestik melalui pemasukan

peralatan modal dan bahan mentah dengan demikian menaikkan laju tabungan marginal dan laju pembentukan modal (Jhingan,1996).

Peranan modal asing dalam pembangunan adalah bersifat komplementer yang diarahkan sesuai prioritas pembangunan. Seperti yang kita ketahui pembangunan ekonomi berarti pengolahan kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan kecakapan manajemen, teknik dan organisasi. Pelaksanaannya harus diusahakan berdasarkan kemampuan yang ada di dalam negeri agar tidak merugikan kepentingan nasional. Menurut Sumantoro (1989), penanaman modal asing harus diarahkan menurut bidang-bidang yang telah ditetapkan prioritasnya oleh pemerintah yaitu untuk sektor-sektor sebagai berikut:

1. Usaha yang membutuhkan modal swasta sangat besar dan teknologi yang tinggi.
2. Usaha yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi.
3. Usaha pendirian industri-industri dasar.
4. Usaha yang menciptakan lapangan pekerjaan.
5. Usaha yang menunjang penerimaan negara.
6. Usaha yang menunjang penghematan devisa atau pengganti impor.
7. Usaha yang menunjang pembangunan daerah.

Kebijakan di bidang penanaman modal asing tersebut secara keseluruhan tercakup pada kebijaksanaan pengembangan dunia usaha dan mencakup bidang-bidang pengaturan teknik dan pengarahan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan usaha, peningkatan penyebaran kegiatan usaha ke

daerah, pembukaan lapangan kerja yang lebih luas bagi tenaga kerja Indonesia dan pengarahannya potensi investasi yang ada.

Dengan melihat kondisi daerah yang tertinggal maka diperlukan penanaman modal untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Modal asing membantu dalam industrialisasi, dalam membangun modal *overhead* ekonomi dan dalam menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas. Modal asing tidak hanya membawa uang dan mesin tetapi juga keterampilan teknik. Ia membuka daerah-daerah terpencil dan menggarap sumber-sumber baru yang belum dimanfaatkan. Risiko dan kerugian pada tahap perintisan juga ditanggung modal asing. Selanjutnya, modal asing mendorong pengusaha setempat untuk bekerja sama dengan perusahaan asing. Ia meniadakan problem neraca pembayaran dan menurunkan tekanan inflasi. Modal asing membantu memodernisasi masyarakat dan memperkuat sektor negara maupun sektor swasta. Penggunaan modal asing dengan demikian penting untuk mempercepat pembangunan ekonomi negara tertinggal (Jhingan,1996).

## **2.2 Daya Saing Daerah**

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sebagaimana tertuang dalam UU No. 22 dan 25 tahun 1999 telah mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2001. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ini menandai dimulainya sebuah babak baru dalam pembangunan daerah. Terlepas dari perdebatan mengenai ketidaksiapan pemerintah di berbagai bidang untuk melaksanakan kedua UU tersebut, otonomi daerah desentralisasi fiskal diyakini merupakan jalan terbaik dalam rangka mendorong pembangunan daerah, menggantikan konsep



pembangunan terpusat yang oleh beberapa pihak dianggap sebagai penyebab lambannya pembangunan di daerah semakin membesarnya ketimpangan antardaerah. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yang berarti adanya keleluasaan bagi daerah untuk mengembangkan potensi penerimaan daerah pada satu sisi, dan keleluasaan untuk menyusun daftar prioritas pembangunan di sisi lainnya, akan dapat mendorong percepatan pembangunan.

Daya saing (*Competiveness*) merupakan salah satu kata kunci yang lekat dengan pembangunan ekonomi daerah. Menurut Camagni (2002) mengungkapkan bahwa daya saing daerah kini merupakan salah satu isu sentral, terutama dalam rangka mengamankan stabilitas ketenagakerjaan, dan memanfaatkan pertumbuhan kesejahteraan dan kemakmuran daerah. Pada dasarnya ditujukan untuk membantu daerah-daerah di Indonesia dalam mengidentifikasi potensi dan prospek ekonomi daerah yang dapat dijadikan sebagai ukuran daya saing. Menurut Abdullah, Armida, Nurry Effendi dan Boediono (2002) daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional.

Menurut United Kingdom Dial Test Indikator (UK-DTI), (2000) adalah kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan domestik maupun internasional. Menurut Centre for Urban and Regional Studies (CURDS), (2000) mendefinisikan daya saing daerah sebagai kemampuan sektor bisnis atau

perusahaan pada suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yang tinggi serta tingkat kejayaan yang lebih merata untuk penduduknya.

Menurut Porter (2000), konsep daya saing umumnya dikaitkan dengan kemampuan suatu perusahaan, kota, daerah, wilayah atau negara dalam mempertahankan serta meningkatkan keunggulan kompetitif secara berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan untuk memperjelas konsep daya saing daerah adalah berdasarkan defenisi European Commision (Gardiner,2003) yang mendefinisikan: “Kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan pasar internasional,diiringi oleh kemampuan mempertahankan pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, lebih umumnya adalah kemampuan wilayah untuk menciptakan pendapatan dan kesempatan kerja yang relatif tinggi yang terlihat pada daya saing eksternal”.

### **2.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Daya Saing Investasi**

Dari berbagai literatur, teori ekonomi, serta berbagai diskusi, indikator-indikator utama yang dianggap menentukan daya saing daerah adalah faktor kelembagaan, perekonomian daerah, sistem keuangan, infrastruktur fisik dan kesehatan dan pendidikan dasar.

#### **2.3.1 Faktor Kelembagaan**

Indikator yang bergabung dalam kelembagaan merupakan indikator-indikator yang dibawah kendali pemerintah daerah. Baik buruknya skor yang diperoleh daerah untuk setiap indikator dalam faktor kelembagaan lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Kelembagaan mencakup kapasitas pemerintah dalam menjalankan

fungsi-fungsi pemerintahan dalam hal perumusan kebijakan, pelayanan publik, kepastian dan penegakan hukum, serta pembangunan daerah. Menurut (Abdullah, Armida, Nurry Effendi dan Boediono, 2002) dalam penelitian ini, faktor kelembagaan terbagi menjadi 4 variabel yaitu:

#### 1. Variabel Kepastian Hukum

Variabel ini diukur dari konsistensi peraturan yang ada, baik peraturan pemerintah maupun pemerintah daerah, penegakan keputusan peradilan, sejauh mana sesuatu keputusan peradilan perdana maupun pidana itu dilaksanakan, kecepatan aparat keamanan dalam merespon setiap kondisi gangguan keamanan yang terjadi dan juga seberapa banyak pungutan liar yang terjadi di luar sistem dan prosedur, peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 2. Variabel Pelayanan Aparatur

Variabel ini diukur dari sejauh mana respon kepedulian pemerintah daerah terhadap permasalahan yang ada di kalangan dunia usaha yang ada di daerahnya, bagaimana panjang dan berbelitnya birokrasi pelayanan kebutuhan dunia usaha dalam melakukan usahanya, bagaimana potensi ekonomi daerah dan sejauh mana informasi atas potensi ekonomi daerah itu disebarluaskan atau seberapa banyak akses yang ada untuk mengetahui potensi ekonomi daerahnya dan juga berapa banyak penyalahgunaan wewenang oleh aparat dan seberapa besar penyalahgunaan wewenang oleh aparat dan seberapa besar penyalahgunaan wewenang ini merugikan dunia usaha. persepsi masyarakat dunia usaha terhadap pelayanan kebanyakan masih negatif. Namun hal ini

tidak dapat di generalisir kepada seluruh birokrat di pemerintah sebab masih banyak birokrat yang menjalankan tugas dengan baik.

### 3. Variabel Peraturan Daerah

Variabel ini di ukur dari bagaimana kejelasan tarif dan kesesuaiannya antara ketentuan dengan pemungutannya, bagaimana kejelasan prosedur pengurusan perizinan pembayaran pungutan. Persoalan yang sering muncul dalam perizinan adalah adanya ketidaksesuaian antar ketentuan yang telah ditetapkan dalam aturan formalnya dengan pelaksanaannya dilapangan yang terkait dengan prosedur yang harus dilalui, ketepatan waktu penyesuaian dan besarnya biaya yang harus dilaksanakan, dan juga variabel ini dinilai dari bagaimana proses penyusunan peraturan dalam kaitan dengan dunia usaha apakah ada keterlibatan penuh dari semua unsur yang terkait dalam dunia usaha tersebut

### 4. Variabel Sosial dan Politik

Variabel ini melihat bagaimana kondisi sosial politik daerah adalah berbagai dampak atau akibat dari hubungan timbal balik dari segi kehidupan ekonomi dengan segi kehidupan politik, segi hukum dan segi kehidupan agama, segi kehidupan politik dan keamanan. Variabel ini digunakan untuk mengukur seberapa kondusif aspek sosial, politik, keamanan, dan budaya dalam mendukung perekonomian daerah dan daya tarik investasi daerah. Keamanan diukur dari seberapa besar jaminan keamanan dalam berusaha, bagaimana tingkat keamanan di masyarakat dan bagaimana dampak dari kegiatan unjuk rasa, Politik diukur dari bagaimana hubungan antar eksekutif dan legislatif di

daerah. Seperti kita ketahui bersama dua unsur pemerintahan daerah yang berperan besar terhadap jalannya roda pembangunan di daerah adalah DPRD sebagai unsur legislatif dan Pemda sebagai unsur eksekutif. Bila terjadi konflik antara dua unsur ini akan sangat berpengaruh terhadap pelayanan birokrasi terhadap pelaku usaha, dan Sosial budaya dilihat dari seberapa besar keterbukaan masyarakat menerima dunia usaha yang umumnya dilakukan oleh kaum pendatang dari daerah lain, bagaimana etos kerja masyarakat lokal yang berbeda dengan kinerja tenaga kerja pendatang, bagaimana kemudahan memperoleh hak atas penguasaan tanah dan seberapa besar terjadinya potensi konflik dimasyarakat yang dapat mengganggu kegiatan para pelaku usaha (KPPOD,2005).

### **2.3.2 Perkonomian Daerah**

Perekonomian Daerah merupakan ukuran kinerja secara umum dari perkonomian makro (daerah) yang meliputi penciptaan nilai tambah, akumulasi kapital, tingkat konsumsi, kinerja sektoral perekonomian, serta tingkat biaya hidup. Indikator kinerja ekonomi makro mempengaruhi daya saing daerah melalui prinsip-prinsip seperti nilai tambah merefleksikan produktivitas perekonomian setidaknya dalam jangka pendek, akumulasi modal mutlak diperlukan untuk meningkatkan daya saing dalam jangka panjang, kemakmuran suatu daerah mencerminkan kinerja ekonomi dimasa lalu, kompetisi yang didorong mekanisme pasar akan meningkatkan kinerja ekonomi suatu daerah. Semakin ketat kompetisi pada suatu perekonomian daerah, maka akan semakin kompetitif perusahaan-perusahaan yang akan bersaing secara internasional maupun domestik (Abdullah,

Armida, Nurry Effendi dan Boediono, 2002). Perekonomian ditinjau dari beberapa variabel yaitu potensi ekonomi yang tercermin dari Produk Domestik Regional Bruto baik berdasarkan harga berlaku maupun berdasarkan harga yang berlaku maupun harga konstan yang kemudian dibagi dengan jumlah penduduk sehingga diperoleh nilai PDRB per kapita, pertumbuhan ekonomi daerah yang merupakan nilai persentase perbedaan antara PDRB dari tahun ke tahun dan juga indeks kemahalan konstruktif yang menunjukkan nilai kumulatif rata-rata barang konsumsi konstruksi yang ada (KPPOD,2005).

Potensi ekonomi juga dapat dilihat dari potensi yang berbasis sumber daya alam, maupun potensi akibat bentukan karena didorong oleh aktivitas usaha atau adanya investasi. Setiap daerah mempunyai corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan daerah lain. Oleh sebab itu perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah pertama perlu mengenali karakter ekonomi, sosial dan fisik daerah itu sendiri, termasuk interaksinya dengan daerah lain dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi daerah, baik jangka panjang maupun jangka pendek, pemahaman mengenai teori pertumbuhan ekonomi wilayah, yang dirangkum dari kajian terhadap pola-pola pertumbuhan ekonomi dari berbagai wilayah, merupakan satu faktor yang cukup menentukan kualitas rencana pembangunan ekonomi daerah.

Variabel ketenagakerjaan atau indikator Sumber Daya Manusia dalam hal ini ditujukan untuk mengukur ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia. Faktor SDM ini mempengaruhi daya saing daerah berdasarkan prinsip-prinsip seperti angkatan kerja dalam jumlah besar dan berkualitas akan meningkatkan

daya saing suatu daerah, pelatihan dan pendidikan adalah cara yang paling baik dalam meningkatkan tenaga kerja yang berkualitas, sikap dan nilai yang dianut oleh tenaga kerja juga menentukan daya saing suatu daerah, kualitas hidup masyarakat suatu daerah menentukan daya saing daerah tersebut begitu juga sebaliknya (Abdullah, Armida, Nurry Effendi dan Boediono, 2002) .

### **2.3.3 Faktor Sistem Keuangan**

Indikator sistem keuangan merefleksikan kemampuan sistem finansial perbankan dan non perbankan di daerah untuk memfasilitasi aktivitas perekonomian yang memberikan nilai tambah. Sistem keuangan suatu daerah akan mempengaruhi alokasi faktor produksi yang terjadi di perekonomian daerah tersebut (Abdullah, Armida, Nurry Effendi dan Boediono, 2002). Indikator sistem keuangan ini mempengaruhi daya saing daerah melalui prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Sistem keuangan yang baik mutlak diperlukan dalam memfasilitasi aktivitas perekonomian daerah.
2. Sektor keuangan yang efisien dan terintegrasi secara internasional mendukung daya saing.

### **2.3.4 Faktor Infrastruktur**

Infrastruktur fisik adalah berbagai instalasi dan kemudahan dasar yang diperlukan masyarakat dalam melakukan aktivitas perdagangan dan kelancaran pergerakan barang dari satu daerah ke daerah lain atau juga dari satu negara ke negara lain. Faktor infrastruktur fisik dibagi menjadi dua variabel yaitu:

### 1. Variabel Ketersediaan Infrastruktur Fisik

Ketersediaan infrastruktur fisik diperlukan untuk kelancaran kegiatan usaha. Agar kelancaran kegiatan usaha tercapai maka harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur fisik yang memadai seperti jalan raya, kereta api, pelabuhan laut dan udara, sarana komunikasi, dan sumber energi

### 2. Kualitas dan Akses Terhadap Infrastruktur Fisik

Infrastruktur yang tersedia belum tentu menjamin kelancaran kegiatan usaha. Maka infrastruktur yang tersedia juga harus memiliki kualitas yang baik. Kualitas infrastruktur yang baik ditunjukkan dengan kemudahan akses terhadap infrastruktur yang ada.

Faktor infrastruktur fisik merupakan faktor yang menjadi pertimbangan yang cukup penting dalam berinvestasi. Dukungan infrastruktur yang baik mampu meningkatkan produktivitas faktor-faktor penentu berinvestasi lainnya. Semakin besar skala usaha maka kebutuhan akan infrastruktur juga semakin besar. Implikasinya, jika pemerintah daerah menginginkan masuknya investor dengan skala usaha besar maka pemerintah daerah harus mampu mempersiapkan skala infrastruktur yang juga besar guna menunjang kegiatan usaha investor. Dua variable utama dalam menunjang infrastruktur fisik adalah variabel ketersediaan dan kualitas infrastruktur fisik. Kedua variabel ini sangat berpengaruh terhadap kelancaran kegiatan usaha daerah (KPPOD,2005).

### **2.3.5 Faktor Kesehatan dan Pendidikan Dasar**

Kesehatan dan Pendidikan Dasar mengukur sudah sampai dimana kemampuan daerah dalam aktivitas ekonomi yang meningkatkan nilai tambah.



Pada indikator kesehatan melihat sudah sejauh mana kemampuan dalam pemenuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kota Pematangsiantar. Sedangkan indikator pendidikan dasar dipengaruhi oleh beberapa prinsip seperti keunggulan kompetitif dapat dibangun melalui aplikasi teknologi yang sudah ada secara efisien dan inovatif, investasi pada penelitian dasar dan aktivitas yang inovatif yang menciptakan pengetahuan baru sangat krusial bagi daerah ketika melalui tahapan pembangunan ekonomi yang lebih maju, dan investasi jangka panjang berupa R&D akan meningkatkan daya saing sektor bisnis (Abdullah, Armida, Nurry Effendi dan Boediono, 2002).

#### **2.4 Penelitian Terdahulu**

Lingkungan bisnis yang sehat diperlukan untuk dapat menarik investor dalam dan luar negeri. Beberapa sumber membuktikan, faktor utama yang mempengaruhi lingkungan bisnis adalah tenaga kerja dan produktivitas, perekonomian daerah, infrastruktur fisik, kondisi sosial politik, dan kelembagaan (institusi).

Survei yang dilakukan KPPOD (2003) menunjukkan bahwa institusi atau kelembagaan merupakan faktor utama yang menentukan daya tarik investasi di suatu daerah, diikuti oleh kondisi sosial politik, infrastruktur fisik, kondisi ekonomi daerah dan produktivitas tenaga kerja.

Menurut hasil penelitian Eko Budi Santoso (2009) tentang daya saing kota-kota besar di Indonesia. Kota besar yang ada di Indonesia mempunyai peran strategis dalam pembangunan wilayah sebagai simpul jasa, koleksi dan distribusi, yang mempunyai hubungan ke belakang dengan kota-kota kecil dan hinterlandnya

dan juga hubungan ke depan dengan kota-kota besar lainnya. Salah satu kinerja perkotaan diukur dari kemampuan daya saing kota yang dibentuk oleh faktor-faktor utama (input) dan kinerja perekonomian (output). Faktor utama pembentukan daya saing terdiri dari 5 indikator yaitu lingkungan usaha produktif, perekonomian daerah, ketenagakerjaan dan sumber daya manusia, infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan, dan perbankan dan lembaga keuangan. Sedangkan kinerja perekonomian (output) mencakup produktivitas tenaga kerja, tingkat kesempatan kerja, dan PDRB per kapita. Dalam pembahasan ini akan dilakukan pemetaan terhadap 24 kota besar di Indonesia diluar DKI Jakarta, yang mempunyai jumlah penduduk kurang lebih 500.000 jiwa ke atas. Daya saing kota dilakukan dengan penentuan peringkat berdasarkan faktor-faktor besar berdasarkan kinerja indikator input dan indikator output. Hasil pengelompokan tersebut diperoleh tingkat efisiensi kota dalam mencapai daya saing yang tinggi. Kota besar yang mempunyai daya saing dan tingkat efisiensi tinggi dalam hubungan kinerja indikator input dan indikator output adalah kota Batam dan kota Balikpapan.

Menurut hasil studi penelitian Ida Nuraini (2015) tentang analisis daya saing investasi di Kota Batu. Kota Batu memiliki potensi pada sektor pertanian khususnya sayur dan buah-buahan, sektor industri yang potensial adalah industri pariwisata dan industri rumah tangga. Berdasarkan fasilitas non fisik Kota Batu berada pada peringkat 8 terakhir dibandingkan dengan wilayah kabupaten dan kota sekitarnya. Kelemahan dari Kota Batu dalam hal daya saing antar lain: kondisi makro ekonomi, pendapatan daerah, industrialisasi, pangan dan kinerja

aparatur. Dalam pelayanan dan penyediaan fasilitas fisik Kota Batu sendiri hanya menduduki peringkat ke-7 sedangkan Kota Batu mempunyai kelemahan yang paling mendasar pada fasilitas kesehatan dan ekonomi. Untuk itu pemerintah Kota Batu harus terus melakukan peningkatan sarana dan prasarana baik fisik maupun non fisik agar iklim investasi tumbuh lebih baik dan agar tidak ketinggalan dibandingkan Kabupaten maupun Kota di sekitarnya.

Menurut studi penelitian Ahmad Papin Herdian(2014) tentang analisis daya saing investasi di Kota pematangsiantar meneliti apa yang mempengaruhi kegiatan investasi di Kota Pematangsiantar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan investasi daerah, yaitu faktor kelembagaan, sosial politik, ekonomi daerah, tenaga kerja dan produktivitas, dan infrastruktur fisik. Penelitian ini mengadopsi metode KPPOD untuk menganalisis kegiatan investasi pada tingkat daerah dan menggunakan *Analytical Hierarchy Process (AHP)* untuk menguji iklim usaha di Kota Pematangsiantar. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor kelembagaan menjadi faktor yang lebih dominan, diikuti faktor ekonomi daerah, faktor infrastruktur fisik, faktor tenaga kerja dan produktivitas, serta faktor sosial politik.

Menurut hasil studi penelitian Haryadi Kamal (2010) tentang Analisis Daya Tarik Investasi Di Provinsi Jambi menunjukkan aliran investasi masuk belum menunjukkan perkembangan yang signifikan di Provinsi Jambi, terutama bila dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan oleh daerah. Faktor yang menjadi pertimbangan paling utama pengusaha dalam berinvestasi adalah faktor kelembagaan. Faktor kedua adalah sosial politik sementara yang ketiga adalah

infrastruktur fisik. Faktor yang keempat adalah ekonomi daerah dan tenaga kerja merupakan faktor yang terakhir. Aparatur pelayanan, peraturan daerah, kepastian hukum, ketersediaan infrastruktur fisik dan keberadaan perbankan merupakan lima variabel yang paling menentukan daya tarik investasi suatu daerah. Sistem dan proses pelayanan investasi di Provinsi Jambi belum maksimal. Sebagian investor masih mengeluhkan tentang proses pengurusan persetujuan izin usaha, dan adanya biaya siluman atau pungutan tak resmi serta sistem pelayanan yang belum satu pintu. Di samping itu lamanya pengurusan izin menyebabkan para calon investor harus mengeluarkan biaya tambahan tak resmi.

Menurut hasil studi penelitian Bardi, Diviya (2014) tentang Analisis Daya Saing Ekonomi Kota Tebing Tinggi yang menggunakan analisis Hierarki Proses (AHP). Penelitian ini menggunakan data primer dengan kuesioner dan wawancara terhadap 30 responden yang terdiri dari mahasiswa, staf/pengajar, tokoh masyarakat, birokrasi, perbankan, non perbankan, dan pengusaha. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang paling dominan dalam meningkatkan daya saing ekonomi Kota Tebing Tinggi, yang pertama adalah infrastruktur fisik (0,272), kemudian faktor tenaga kerja dan produktivitas (0,239), faktor kelembagaan (0,169), dan posisi yang terakhir sosial politik (0,116).

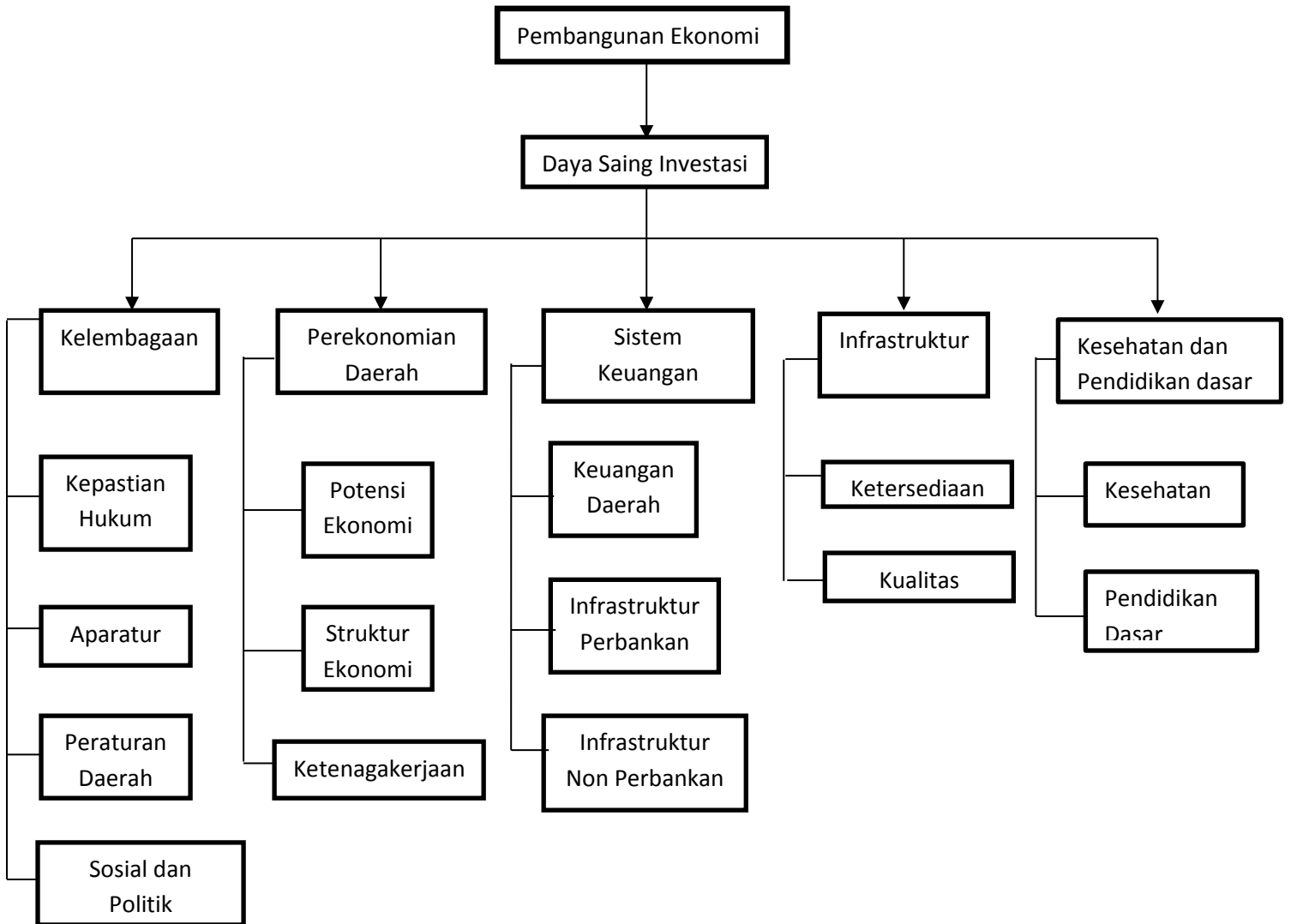
## **2.5 Kerangka Konseptual**

Dalam pembangunan ekonomi regional investasi memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Secara umum, investasi baik PMA atau PMDN membutuhkan adanya iklim yang sehat, kemudahan serta kejelasan prosedur penanaman modal. Investasi masuk ke dalam suatu daerah tergantung

pada daya tarik daerah tersebut terhadap investasi serta adanya iklim investasi yang kondusif. Keberhasilan daerah untuk menentukan faktor-faktor yang digunakan sebagai acuan daya saing perekonomian daerah. Pembangunan suatu daerah sangat bergantung pada kegiatan investasi wilayah yang secara berkesinambungan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peringkat yang menjadi faktor-faktor daya saing investasi di Kota Pematangsiantar. berdasarkan tujuan serta menjawab pertanyaan dalam penelitian ini, faktor-faktor dan variabel daya saing investasi di Kota Pematangsiantar adalah:

1. Faktor kelembagaan yang variabelnya adalah kepastian hukum, aparatur, peraturan daerah dan sosial politik
2. Faktor Perekonomian Daerah yang variabelnya adalah potensi ekonomi, struktur ekonomi dan ketenagakerjaan.
3. Faktor Sistem Keuangan yang variabelnya adalah keuangan daerah, infrastruktur perbankan dan infrastruktur non perbankan.
4. Faktor Infrastruktur yang variabelnya adalah kualitas dan ketersediaan infrastuktur yang mendukung daya saing.
5. Faktor Kesehatan dan Pendidikan dasar yang variabelnya adalah kesehatan dan pendidikan dasar.



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**